

DISKUSI PUBLIK NASIONAL

National Public Discussion



Rekonseptualisasi Arah Pembangunan Nasional Dalam Mewujudkan Cita - Cita Bangsa

FREE HTM

Minggu, 20 Maret 2022
09.00 - 13.00 wib



Alin Suhebah
Anggota DPR PERMATA Tanggung
Master Of Ceremony



Nur Khalifah, S.H.
Dir. Administrasi JPI

Moderator

Opening Speech

**Dr. Ibnu Sina
Chandranegara.,SH.,MH.**
(Dewan Penasehat Juris Polis Institute)

Keynote Speech I

**H. Bambang
Soesatyo, S.E, MBA**
(Ketua MPR RI)

Keynote Speech II

**Ir. H. La Nyalla
Mahmud Mattalini**
(Ketua DPD RI)

Contact Person

Selvi: +62 816-1967-372
Ferdiansyah: +62 878-4607-0543

Narasumber

Prof. Deny Indrayana., SH., L.L.M.
(Senior Lawyer Integrity Lawfirm)

Dr. Ahmad Redy.,SH.,MH. Ph.D.
(Direktur Kegium Juris institute & Dosen FH UNTAR)

Dr. Aulia Khasanofa.,SH.,MH.
(Sekjend Mahutama & Wadok FH UMT)

**Kementerian PPN/Bappenas
Republik Indonesia**

Takap Konfirmasi

Link Pendaftaran :

<https://bit.ly/DIALOGPUBLIKMILADJPI>

Fasilitas
Materi
E-Sertifikat

Collaboration
With:



Rekonseptualisasi Arah Pembangunan Nasional Dalam Mewujudkan Cita-Cita Bangsa

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Juris Polis Institute (Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik)

Melbourne, 20 Maret 2022



Alur Pembahasan

- 1. Arah Pembangunan Hukum Pemerintah.**
- 2. Kembali kepada GBHN/PPHN - Apakah Solusi?**
- 3. Amandemen ke-5.**

1 | Arah Pembangunan Hukum Nasional Pemerintah Saat Ini

Arah Penegakan Hukum Dalam Visi-Misi Ir. H. Joko Widodo – Prof. Dr. Ma'ruf Amin

VISI

Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong
Royong



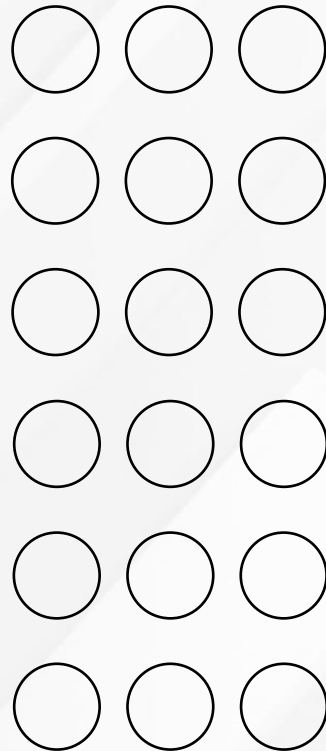
MISI

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. **Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya**
7. **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara**
8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Arah Kepemimpinan Dalam Pidato Pelantikan Presiden:

- a) Pertama, **pembangunan SDM** akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis
- b) Kedua, **pembangunan infrastruktur** akan kita lanjutkan.
- c) Ketiga, segala bentuk kendala **regulasi harus kita sederhanakan**, harus kita potong, harus kita pangkas. Menciptakan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM
- d) Keempat, **penyederhanaan birokrasi** harus terus kita lakukan besar-besaran
- e) Kelima, **transformasi ekonomi**. Merubah dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi

Pidato Pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober 2019

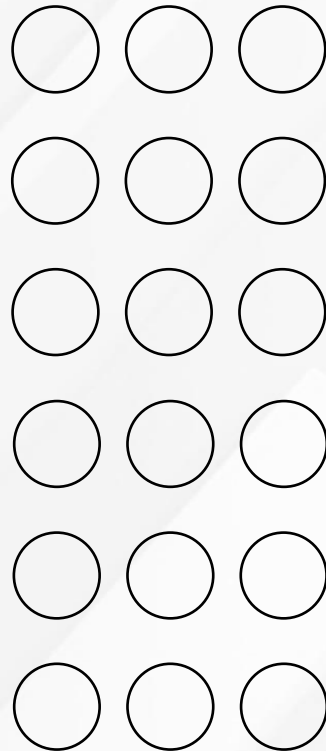


**Perbaikan
penegakan Hukum,
HAM, dan
Pemberantasan
Korupsi **TIDAK**
TERMASUK ke dalam
arah kepemimpinan
sejak awal.**



DAMPAKNYA:

- 1. Oligarki Terpelihara.**
- 2. Duitokrasi Merajalela.**
- 3. Pembunuhan KPK.**
- 4. Penundaan Pemilu.**
- 5. DLL.**



OLIGARKI DI INDONESIA

Sistem Politik yang Koruptif

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara Pemerintah dengan Pengusaha



Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha

Parpol yang **Koruptif**

Media yang **Terkooptasi**

Oknum Aparat Keamanan

The **Real**
Power
Holders

Duitokrasi Kills Indonesia's Democracy

**Kepala Negara
tersandera
kepentingan
politik dan bisnis
pemodal?**

Jokowi Resmikan Pabrik Biodiesel Haji Isam, Pengusaha yang Disebut di Suap Pajak

Jokowi meresmikan pabrik biodiesel PT Johnlin Group milik pengusaha Kalsel Samsudin Andi Arsyad atau sering disapa Haji Isam.



Akbar Evandio - Bisnis.com

21 Oktober 2021 | 21:49 WIB



Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Pabrik Biodiesel milik PT Jhonlin Agro Raya di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis (21/10 - 2021) / BPMI Setpres

Oligarch, Media Control, and Elections

- Major media groups own five out of six Indonesian newspapers with the highest circulation, and all four biggest online news media sites. Further, ownership of TV stations is concentrated in five corporations that control 96,6% of all national stations.
- The parties become vulnerable to and dependent on oligarch - a wealthy individual or conglomerates who dominate Indonesia political parties.



KOMITMEN PRESIDEN, ada tapi tersandera? Atau ...

Surat Terbuka

"Saya tidak akan membiarkan KPK dilemahkan. KPK sebagai sebuah institusi, yang dipercaya oleh masyarakat, sangat dipercaya masyarakat, ya harus kita perkuat. Harus itu, harus kita perkuat untuk mempercepat pemberantasan korupsi."

-JOKOWI, 17 September 2017

**2020: Pembiaran
pembunuhan KPK.**

POLITIK HUKUM ANTI KORUPSI: SEMAKIN MURAM

1. **KPK LUMPUH!:** Revisi UU KPK, Pemecatan Pegawai KPK.
2. **OBRAL REMISI:** PP 99 DICABUT (Pasal terkait syarat pengetatan remisi)
3. **Diskon Putusan MA:** Korupsi Edhy Prabowo (9 tahun jadi 5 tahun)



2| Kembali kepada GBHN/PPHN Apakah Solusi?

MENERAPKAN KEMBALI GBHN/PPHN SALAH SATU WACANA AMANDEMEN KE-5



1. Pokok-Pokok Haluan Negara.
2. Memperkuat lagi MPR – termasuk memilih Presiden?
3. Menunda Pemilu 2024 karena alasan Pandemi Covid-19
4. Tiga Kali Masa Jabatan Presiden

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

Saat ini : Belum ada usulan resmi

Secara Normatif, syarat perubahan :

- Diusulkan tertulis lebih dari 1/3 MPR
- Kuorum kehadiran lebih dari 2/3 MPR
- Kuorum persetujuan lebih dari ½ MPR



1. Pokok-Pokok Haluan Negara



PPHN = GBHN?

SETBACK KEPADA MODEL PEMERINTAHAN LAMA

**Wacana Materi Muatan PPHN
dalam Amandemen
UUD 1945
Rentan Membangkitkan
Gagasan GBHN**

- PSHK

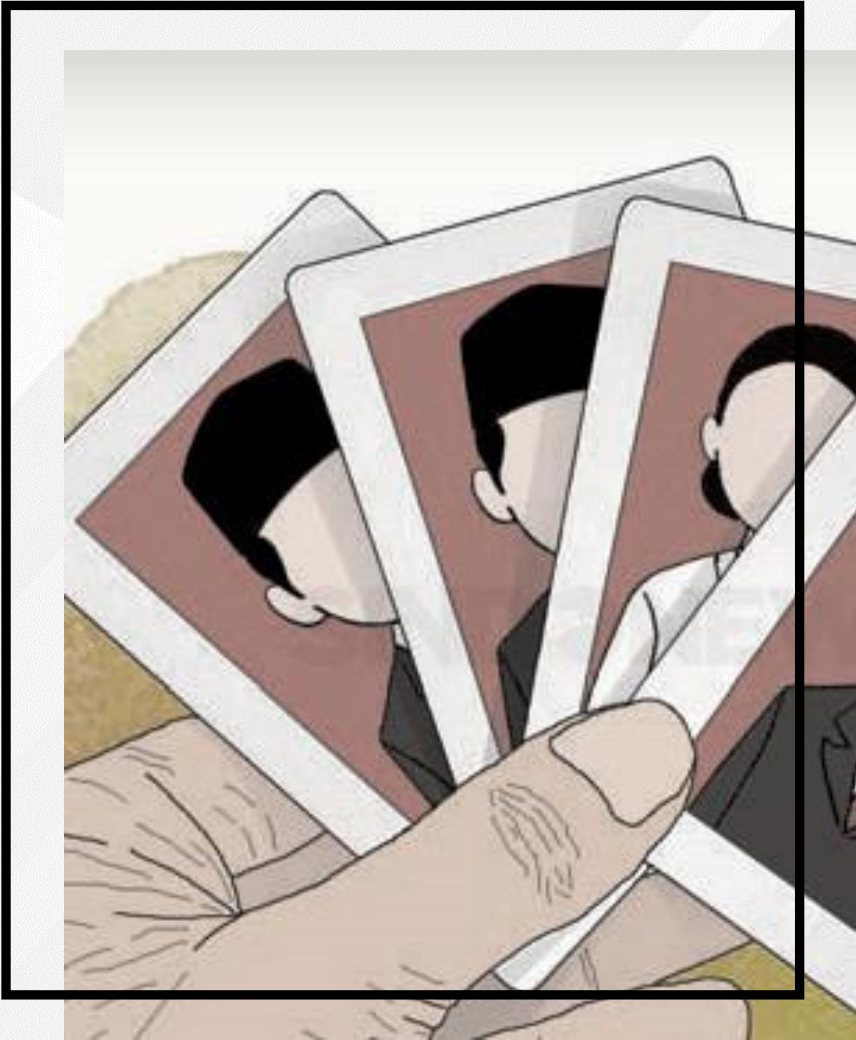
**Merusak Sistem Presidensial di
Indonesia**

Melawan Arus Sejarah

Memperburuk Kinerja Parlemen

**Melawan Komitmen Arah
Pembangunan**

**Melawan Prinsip Partisipasi Publik
Dalam Pemerintahan**



2. Memperkuat MPR - Termasuk Memilih Presiden

USULAN PPHN DAN MENGUATKAN LAGI MPR

Sudah ada UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menjadikan MPR Kembali menjadi Lembaga tertinggi negara?

Presiden Kembali mempertanggungjawabkan PPHN Kepada MPR?

Presiden Kembali dipilih MPR?

SEHARUSNYA

Menuju konstitusi yang lebih demokratis

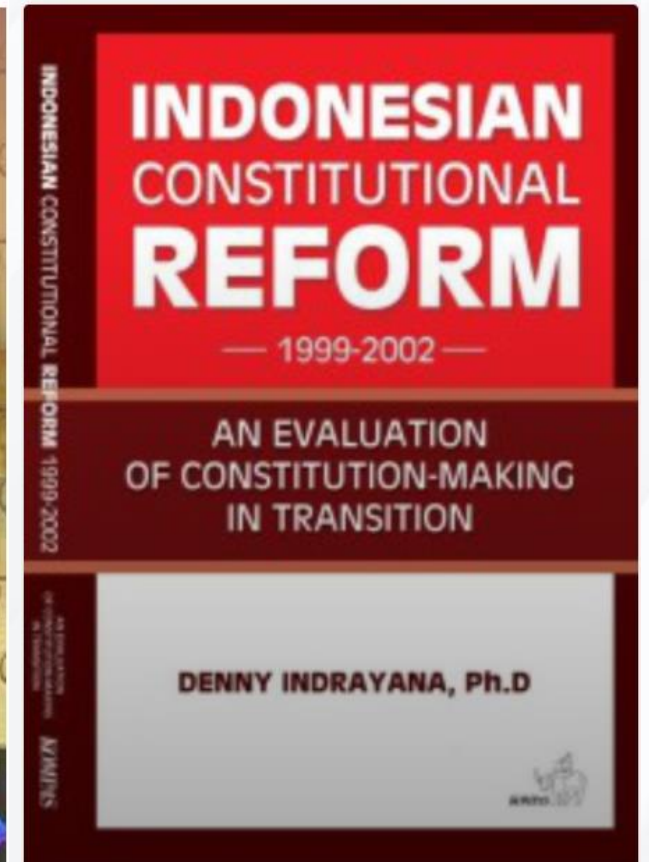
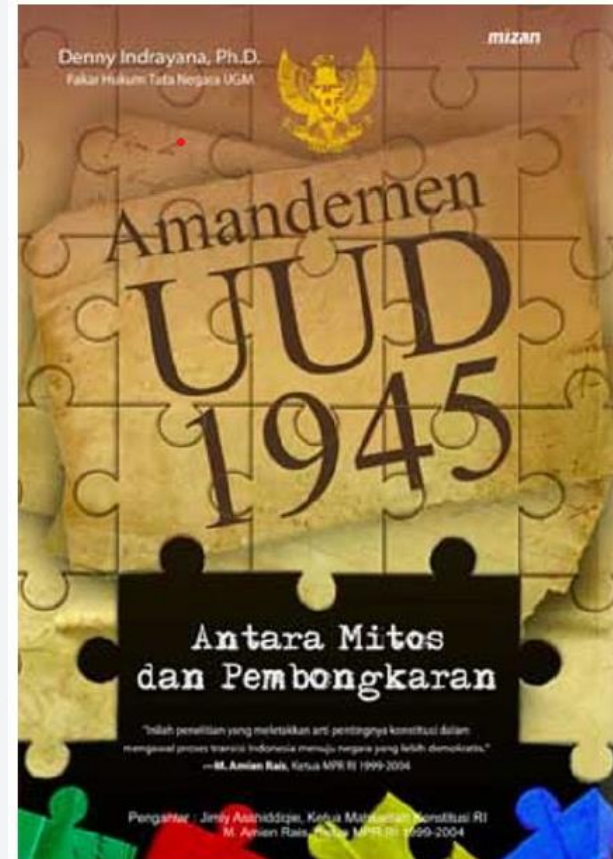
*Pembatasan kekuasaan, bukan justru membuka **abuse of power**.*

Perlindungan HAM, bukan justru melanggar HAM



Di Indonesia, keempat perubahan UUD 1945 akhirnya **merambah ke sejumlah besar persoalan dan mengubah hampir seluruh** naskah asli UUD 1945.

Amandemen-amandemen yang dilakukan lebih kepada upaya membuat konstitusi baru dengan menggunakan proses perubahan secara bertahap.



Available on: <https://www.integritylawfirm.id/category/buku/>

KESIMPULAN DISERTASI

1. Meskipun melalui proses yang TIDAK terlalu rapi, hasilnya adalah dokumen konstitusi yang lebih demokratis.
2. Meskipun tidak sebaik partisipasi publik di Afrika Selatan, namun momentum Reformasi membantu proses di Indonesia untuk menuju *democratic constitutional reform*.



<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indrayana-Indonesian-Constitutional-Reform-1999-2002.pdf>

Agenda amandemen mestinya menjawab kesepakatan-kesepakatan dasar konstitusi

Proses amandemen dilengkapi draft akademik sebagai panduan proses perubahan

Semakin krusial pasal-pasal yang dibahas, semakin kuat *vested interest*

Harus ada transparansi dalam pembahasan proses amandemen di MPR

Catatan Proses Amandemen

3 | Amandemen ke-5

What Next? **Solusi dan Aksi**

Putus hubungan kolusif penguasa dan pengusaha

Penguasa harus lebih **independen** dari kepentingan bisnis

Penegakan hukum harus lebih **tegas**

Mafia hukum harus **diberantas**

KPK harus diperkuat, bukan diperlemah, apalagi **dimatikan**

Next Apabila Amandements

Penguatan Bikameral: DPD

Penguatan Perlindungan HAM:
Constitutional Complaint di MK

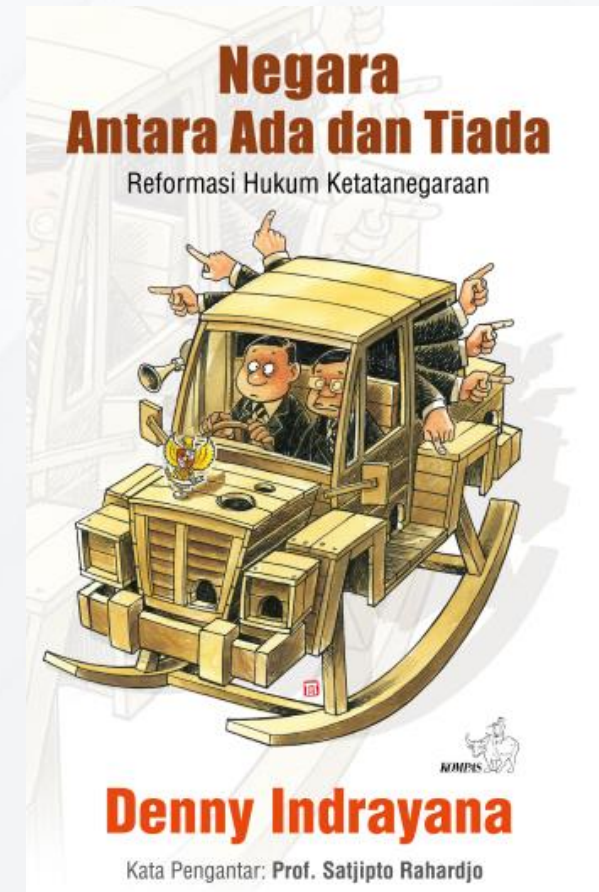
Penguatan *Rule of Law*

Bukan hal tabu
LIVING Constitution

Parlemen Indonesia : ***Neither Meat, Nor Fish***

“Pilihan sistem parlemen Indonesia, pasca-Perubahan Ketiga UUD 1945, kembali meneguhkan pola “bukan-bukan” sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang ‘daging’ bukan, ‘ikan’ juga bukan; neither meat, nor fish” – Prof. Denny Indrayana: Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan

Misalnya, sebelum amandemen UUD 1945 kita menganut sistem pemerintahan yang bukan parlementer, tetapi bukan pula presidensial



<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indrayana-Negara-antara-Ada-dan-Tiada.pdf>

Penguatan Mengarah Kepada Bikameral yang Efektif

Jangan *Soft Bicameralism*, Bukan semata *Strong Bicameralism*, tetapi bikameral yang efektif (*effective bicameralism*)

Rule of Law – Penguatan **Independent Agencies**

- Pemilu yang *Free and fair*: **KPU**
- Menguatkan Good Governance: **KPK** dijadikan organ konstitusi
- Menguatkan *check and balances* dalam Proses Seleksi Anggota **BPK**
- Menguatkan Kebebasan Pers: **Dewan Pers Indonesia**
- Menguatkan Perlindungan HAM: **Komnas HAM**
- Menguatkan Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan Merdeka: **Komisi Yudisial**

INTEGRITY

TIDAK TERBELI !
NO Mafia Hukum !



“Integrity is doing
the right thing,
even when no one
is watching.”

C. S. Lewis

INTEGRITY Programs

- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Client Alert
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

INTEGRITY
NARAHUBUNG

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER **KEYNOTE SPEAKER**

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
AKA Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yuseus Hussein, S.H., LL.M.
Kepala PPATK Tahun 2002-2011
Kaltas STIR - Jakarta

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Vice Integrity

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
Pukul. 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Dianayah, S.H.
Managing Partner Vice Integrity Law Office

SESI VI
Irene Pulis, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Perimbangan Hukum JAMKATON KESABUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Rabu, 28-29 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Sesi Makan Malam
- Sesi Makan Malam
- Sesi Makan Malam

MATERI TRAINING

SESI I

1. Mengenal Sistem Anti Korupsi & Korupsi
2. Mengenal Sistem Anti Korupsi & Korupsi

SESI II

1. Strategi Pengawasan Risiko dan Pencegahan yang baik
2. Mengenal Risiko dan Pencegahan yang baik
3. Mengenal Risiko dan Pencegahan yang baik

SESI III

1. Pencegahan dan Deteksi Dini Korupsi
2. Strategi Pengawasan Risiko dan Pencegahan yang baik

SESI IV

1. Mengenal Sistem Anti Korupsi & Korupsi
2. Mengenal Sistem Anti Korupsi & Korupsi
3. Mengenal Sistem Anti Korupsi & Korupsi

SESI V

1. Pengawasan risiko: orang dan proses
2. Strategi pengendalian risiko: orang dan proses
3. Strategi pengendalian risiko: orang dan proses

SESI VI

1. Strategi pengendalian risiko: orang dan proses
2. Strategi pengendalian risiko: orang dan proses
3. Strategi pengendalian risiko: orang dan proses

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi
Rp. 100.000,- Full Paket Materi (Materi & Sertifikat 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
5511000000
KCS PO INDAH WATI INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 25 September 2021
melalui link www.integritylawfirm.id

NARAHUBUNG Abdulrahman Zainal : 0821 2535 2488

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Sekeloa Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bi.
Fahmi H. Rani, S.E., M.A.

MODERATOR
Karnis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD1

FREE

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGENSI AMANDAMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Muh. Mahfud MD
Yudi Latief
Arnel Sami

MODERATOR

M. Satrio
Denny Indrayana

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2

Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD2

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER **NARASUMBER**

Denny Indrayana
Muh. Thaqori
Rafly Harun

MODERATOR

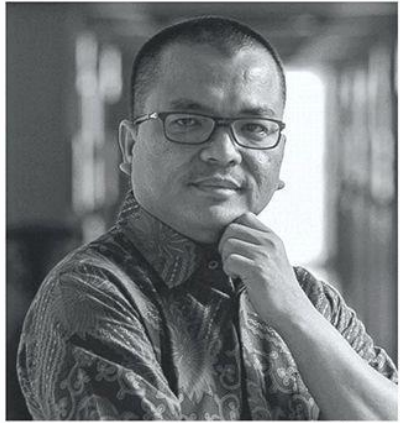
M. Satrio
Denny Indrayana

Link Pendaftaran: bit.ly/integrityCD3

<https://www.integritylawfirm.id/category/program/integrity-scholarship/>

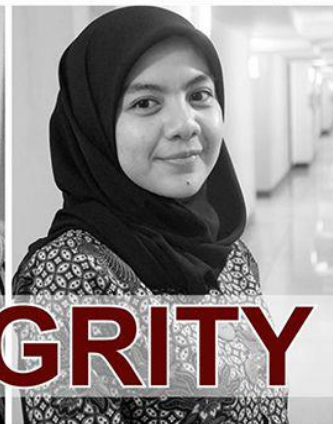
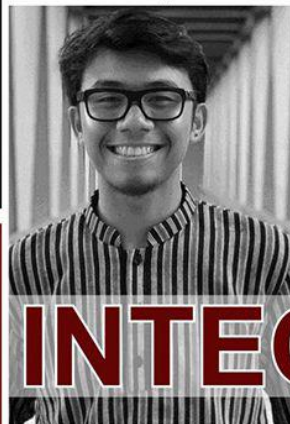


<http://www.integritylawfirm.id>



IN

TE

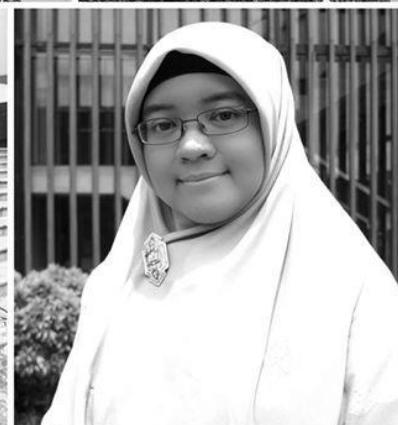


We are the

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

